

PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM MELALUI PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI PULAU LIKI, KABUPATEN SARMI, PROVINSI PAPUA

Encik Ryan P.Fekri¹⁾

¹⁾Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Institut Teknologi Bandung, Indonesia
e-mail: ryanpradanafekri@gmail.com¹⁾

ABSTRAK

Paper ini disusun sebagai bentuk implementasi di Indonesia terkait artikel yang ditulis oleh Zandvoort et. al (2018) tentang Navigating amid uncertainty in spatial planning. Dalam artikel tersebut, peneliti menjelaskan ketika mengambil keputusan atau mempersiapkan kemungkinan intervensi, perencana akan selalu dihadapkan dengan ketidakpastian. Salah satu bentuk ketidakpastian yang dihadapi perencana adalah risiko perubahan iklim. Para perencana diharuskan untuk menilai dampak perubahan iklim untuk merancang intervensi spasial sebagai upaya adaptasi iklim. Sebagaimana di Pulau Liki, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua yang sedang dicanangkan sebagai kampung iklim sebagai respon terhadap dampak perubahan iklim yang mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat Pulau Liki yaitu adanya ancaman abrasi yang terjadi akibat naiknya permukaan air laut. Sehingga Pemerintah Kabupaten Sarmi menginisiasi Kampung Iklim Pulau Liki sebagai upaya pengendalian dampak perubahan iklim khususnya dengan melakukan upaya adaptasi dan mitigasi untuk mewujudkan Pulau Liki sebagai Kampung Ramah Iklim tahun 2019.

Kata Kunci: ketidakpastian, perubahan iklim, kampung iklim, adaptasi, mitigasi, perencana.

I. PENDAHULUAN

Zandvoort, et. al (2018) berpendapat bahwa salah satu bentuk ketidakpastian yang dihadapi perencana adalah risiko perubahan iklim. Para perencana diharuskan untuk menilai dampak perubahan iklim dalam merancang intervensi spasial sebagai upaya adaptasi iklim, meskipun perubahan iklim dapat mengubah lingkungan lokal dengan cara yang tidak dapat diprediksi. Perubahan iklim merupakan salah satu fenomena alam yakni terjadi perubahan nilai unsur-unsur iklim, baik secara alamiah maupun yang dipercepat akibat aktivitas manusia di muka bumi (Nurdin, 2011). Menurut United States Global Climate Change Programme (dalam Okoli & Ifeakor, 2014) perubahan iklim didefinisikan sebagai reaksi ekstrem fenomena cuaca yang menciptakan dampak negatif pada sumber daya pertanian, sumber daya air, kesehatan manusia, penipisan lapisan ozon, vegetasi dan tanah, yang menyebabkan dua kali lipat dari konsentrasi karbon dioksida dalam ekosistem. Perubahan iklim secara langsung berdampak negatif kepada manusia dan lingkungan sekitarnya, sehingga memang perubahan iklim menjadi fokus semua pihak untuk mengatasinya (Mustangin, 2017). Berdasarkan kondisi yang terjadi saat ini khususnya mengenai perubahan iklim, sehingga perlu adanya peran atau partisipasi dari perencana dalam memberikan upaya adaptasi maupun mitigasi kepada masyarakat. Mengingat ancaman utama perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat menurut UNDP (2007) antara lain berdampak kepada sumber nafkah, kesehatan, ketahanan pangan, dan air. Oleh karena itu, harus dilakukan upaya penguatan kepada masyarakat yang bersifat *top down* maupun *bottom up* seperti dari pemerintah pusat maupun daerah serta mendorong penguatan aksi dari masyarakat lokal sebagai upaya pengendalian dampak perubahan iklim.

Guna menanggapi kondisi tersebut perlu adanya suatu langkah preventif maupun represif sebagai respon yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan tujuan berjangka pendek, namun juga berjangka panjang dan berorientasi kepada visi pembangunan yang lebih mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan terutama dalam penerapannya pada perencanaan dan pembangunan tata ruang wilayah, kota maupun kawasan guna meningkatkan upaya pengendalian dampak perubahan iklim yang terjadi. Seiring dengan hal ini Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam upaya peningkatan pengendalian akan dampak perubahan iklim tersebut pada tahun 2012 meluncurkan Program Kampung Iklim (ProKlim) yaitu merupakan program berlingkup nasional yang dikembangkan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mencatat pada tahun 2016 terdapat 952 lokasi di Indonesia yang terdaftar menjadi kampung iklim. Pemerintah menargetkan pada tahun 2019 terdapat 2.000 lokasi kampung iklim di seluruh Indonesia. Saat ini Pulau Liki di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua sedang dicanangkan menjadi kampung iklim yang diinisiasi oleh Wakil Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarmi mulai tanggal 28 Juli 2017 sebagai langkah awal guna mewujudkan Pulau Liki sebagai Kampung Ramah Iklim tahun 2019. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya adaptasi dan mitigasi yang dilakukan sebagai respon terhadap dampak dari perubahan iklim yang terjadi dan untuk mempersiapkan Pulau Liki sebagai kampung iklim.

II. METODE

Metode penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

A. Metode Pengumpulan Data

Artikel ini menggunakan data dan informasi yang dikumpulkan melalui survei data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari Buku dan Road Map Program Kampung Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dokumen Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai Program Kampung Iklim di Pulau Liki, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.

B. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan berupa analisis isi (*content analysis*). Menurut Cresswell (2009), penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Menurut Babbie (2007), metode analisis isi merupakan metode analisis yang menekankan pada komunikasi yang tercatat seperti buku, hukum, dan tulisan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka memperkuat langkah strategis ketahanan iklim nasional dan sebagai upaya pengendalian dari dampak perubahan iklim maka Pulau Liki di Kabupaten Sarmi dicanangkan menjadi kampung iklim yang diinisiasi oleh Wakil Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarmi. Harapannya bahwa penduduk yang bermukim di Pulau Liki harus mendapat perhatian serius melalui tindakan perlindungan terhadap ancaman perubahan iklim berupa naiknya permukaan air laut dan ancaman abrasi yang rawan terjadi di Pulau Liki.

Setelah dilakukan kajian oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarmi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Papua (LIPTK-Papua) dari sejak awal tahun 2017, diketahui bahwa Pulau Liki memiliki potensi sumber daya alam yang cukup tinggi sehingga sangat berpotensi untuk pembangunan bidang pariwisata berkelanjutan (*sustainable eco-tourism*) dan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*). Namun kajian yang dilakukan tersebut juga menemukan dampak perubahan iklim berupa ancaman serius bagi kehidupan masyarakat maupun keberlanjutan lingkungan di Pulau Liki, antara lain naiknya permukaan air laut yang mengakibatkan abrasi pantai.

Pieter Wamea yang merupakan Pemerhati Lingkungan Hidup dan pendamping pemberdayaan masyarakat dari LIPTK Papua dalam tulisannya pada tahun 2017 yang berjudul “Upaya Mitigasi Kampung Iklim Pulau Liki” menjelaskan bahwa abrasi yang terjadi di Pulau Liki terjadi sebagai dampak dari perubahan iklim. Abrasi di bibir pantai Pulau Liki sepanjang kurang lebih 1 km, mengakibatkan mundurnya garis pantai sekitar 75-100 meter sejak kurun waktu 20 sampai 30 tahun terakhir.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mengategorikan bahwa ancaman terjadinya abrasi dapat digolongkan sebagai suatu bencana yang disebabkan oleh faktor alam, sehingga perlu adanya upaya pengendalian yang harus dilakukan. Oleh karena itu, temuan dari hasil kajian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarmi dan

Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Papua (LIPTEK-Papua) ini menjadi dasar pengusulan dan pencanangan Pulau Liki sebagai Kampung Iklim.

Adapun Program Kampung Iklim bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya sehingga seluruh pihak terdorong untuk melaksanakan aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim)

Dalam rangka mempersiapkan Pulau Liki sebagai Kampung Iklim, maka perlu adanya peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang harus dilakukan sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim yang menjelaskan bahwa perlu dilakukan upaya adaptasi dan mitigasi untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim serta upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Sebagai upaya adaptasi dan mitigasi, saat ini Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Sarmi bersama dengan masyarakat Pulau Liki telah melakukan program atau langkah adaptasi dan mitigasi. Adapun program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan di Pulau Liki adalah sebagai berikut.

TABEL I
PROGRAM ADAPTASI DAN MITIGASI DI PULAU LIKI

Program Adaptasi			
1	Penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggi.	a	gerakan menanam 1.500 pohon pelindung pantai secara bertahap.
		b	kampanye perlindungan dan penyelamatan hutan serta perlindungan terhadap biota-biota yang dilindungi baik di kawasan laut maupun di daratan Pulau Liki termasuk terumbu karang, padang lamun dan mangrove.
2	Pengendalian penyakit terkait iklim	a	Sosialisasi penyakit terkait iklim oleh tenaga kesehatan/medis.
Program Mitigasi			
1	Pengelolaan Sampah	a	Melakukan gerakan kebersihan kampung.
2	Peningkatan tutupan vegetasi	a	Melakukan reboisasi.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui rincian program adaptasi dan mitigasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarmi dan masyarakat Pulau Liki. Program adaptasi dan mitigasi ini dilakukan sebagai bentuk upaya pengendalian dampak perubahan iklim, peningkatan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim serta upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Upaya-upaya yang dilakukan tersebut masih terus berjalan dan masih perlu ditingkatkan dan disebarluaskan kepada seluruh pihak agar dapat secara cepat dan efektif mendorong penguatan aksi atau upaya pengendalian perubahan iklim khususnya menanggulangi ancaman abrasi yang terjadi di Pulau Liki.

Pelaksanaan program kampung iklim di Pulau Liki ini perlu mendapat dukungan dan partisipasi masyarakat dan organisasi perangkat daerah serta mitra pembangunan terkait

yang harus terlibat aktif karena program ini merupakan program integrasi dari berbagai bidang/aspek pembangunan masyarakat.

Adapun saran yang dapat Penulis kemukakan sebagai bahan masukan guna peningkatan pelaksanaan program Kampung Iklim Pulau Liki, yaitu:

- A. Dalam pelaksanaan program kampung iklim, pemerintah perlu meningkatkan penyuluhan atau sosialisasi untuk memberikan informasi atau pengetahuan tentang perubahan iklim khususnya mengenai ancaman abrasi di bibir pantai Pulau Liki kepada masyarakat.
- B. Penyebarluasan informasi mengenai Program Kampung Iklim Pulau Liki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarmi, agar masyarakat dapat diajak untuk bersama-sama untuk melakukan upaya adaptasi dan mitigasi.
- C. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tercipta penguatan aksi lokal guna menjaga keberlanjutan lingkungan dan mengatasi dampak dari perubahan iklim yang terjadi khususnya di Pulau Liki.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Babbie, E. 2007. *The Practice of Social Research*. Eleventh Edition. Thomson Higher Education. Belmont.
- [2] Creswell, J.W. 2008. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications, Inc.
- [3] Direktori Pulau-Pulau kecil Indonesia, Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan, http://www.ppkp3k.kkp.go.id/direktori pulau/index.php/public_c/pulau_info/338, diakses tanggal 9 Desember 2018.
- [4] Mustangin, M. 2017. *Perubahan Iklim dan Aksi Menghadapi Dampaknya: Ditinjau dari Peran Serta Perempuan Desa Pagerwangi*. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 4 (1), 2017, 80-89.
- [5] Nurdin. 2011. *Antisipasi Perubahan Iklim untuk Keber-lanjutan Ketahanan Pangan*. Jurnal Dialog Kebijakan Publik [Edisi: Ketahanan Pangan dalam Perubahan Iklim Global], 4,21-31.
- [6] Okoli, J. N., & Ifeakor, A. C. 2014. *An overview of climate change and food security: Adaptation strategies and mitigation measures in Nigeria*. Journal of Education and Practice, 5(32), 13-19. Retrieved from: <http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/16708>.
- [7] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim.
- [8] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim.
- [9] Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- [10] Wamea, Pieter. 2017. *Kampung Iklim Pulau Liki, Menuju Kampung Ramah Lingkungan 2019*. Laporan LIPTEK-Papua, Provinsi Papua.
- [11] Zandvoort, Mark. Van der Vlist, Marten J. Klijn, Frans. Van den Brink, Adri. 2017. *Navigating amid uncertainty in spatial planning*. Planning Theory, Vol. 17 (1) 96-116. DOI: 10.1177/1473095216684530.